



Jurnal Ilmu Administrasi

TERAKRIDITASI KEPUTUSAN DIRJEN DIKTI
NO. 56/DIKTI/KEP/2005

ISSN : 1829 - 6866
DESEMBER 2009
NO. 3 TAHUN VIII

KAPITALISME "NGAYAU" MUTASI GENETIKA KEBIJAKAN KAPITALISASI PERKEBUNAN MENJADI
KAPITALISME PERKEBUNAN

KAJIAN POLA PEMASARAN KOMODITAS UNGGULAN SAYUR MAYUR PRODUKSI PETANI DI KABUPATEN
GOWA SULAWESI SELATAN

PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KARAKTERISTIK INDIVIDU TERHADAP KEPUASAN KERJA DI
DINAS PENDIDIKAN KOTA SAMARINDA

PENGARUH BUDAYA ORGANISASI DAN KEPUASAN KERJA TERHADAP LOYALITAS KERJA PEGAWAI
BADAN PENANAMAN MODAL PROPINSI JAWA TIMUR

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN KESEHATAN DI PERKOTAAN

PENGARUH PELATIHAN TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KABUPATEN
TABALONG DI TANJUNG KALIMANTAN SELATAN

IMPLEMENTASI SISTEM MANAJEMEN MUTU ISO 9001:2000 PADA PT. JASA RAHARJA (PERSERO)
CABANG KALIMANTAN SELATAN

IMPLIKASI IMPLEMENTASI PP 41 TAHUN 2007 TENTANG ORGANISASI PERANGKAT DAERAH MENUJU
PENINGKATAN PELAYANAN DI KABUPATEN SIDOARJO

PERSEPSI MASYARAKAT TERPELAJAR DI KOTA BANJARMASIN TENTANG PARTAI POLITIK

KEBIJAKAN PELAYANAN KESEHATAN DI KOTA BANJARBARU

PENGARUH PEMBERDAYAAN PEGAWAI TERHADAP PEMBANGUNAN KESEJAHTERAAN SOSIAL
PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA BANJARMASIN

MODEL PENGELOLAAN KONFLIK PERIKANAN TANGKAP UNTUK KEHARMONISAN MASYARAKAT PESIRIS
DI KALIMANTAN SELATAN

PENGARUH AUDIT SUMBER DAYA MANUSIA DAN PENGEMBANGAN SDM TERHADAP PRODUKTIVITAS
KERJA

DELEGASI Jurnal Ilmu Administrasi	Nomor 3	TAHUN VIII DESEMBER 2009	Halaman 238 - 368	ISSN 1829 - 6866
--------------------------------------	------------	--------------------------------	----------------------	---------------------

352

**MODEL PENGELOLAAN KONFLIK PERIKANAN TANGKAP UNTUK
KEHARMONISAN MASYARAKAT PESISIR
DI KALIMANTAN SELATAN
(Desa Tanah Laut, Tanah Bumbu dan Kotabaru April-Oktober 2009)**

Rusmilyansari, Irhamsyah, Erwin Rosadi

Abstract Conflict Management Fishing increasingly needed at the moment and need to get a large portion of attention. The research aims to develop Fishing management model. PISCES methods (surveys and participatory institutional conflict evaluated exercises) and SEM analysis (Structure Equation Model. Research shows (1) The ability of stakeholders to identify the factors causing conflict capture fisheries (fishing lines of conflict, conflict purse seine, conflict taking sea cucumbers and pearl oysters, lampara basic conflict, conflict gill net, floating chart conflict, modern seser conflict, conflict cantrang) directly affects the ability of stakeholders choose conflict resolution techniques used (litigation, negotiation, facilitation and avoidance) (2) The main cause of conflict is the existence of marine fishing competition, Opposition, People, actor and culture that developed in the community, while the techniques of conflict resolution primarily facilitation (3) The ability of stakeholders to use techniques appropriate conflict resolution directly affects outcome (importance of participation in capture fisheries conservation, coastal community harmony) (4) conflict management mechanism is an integrated effort which the government requires the participation of all parties to the conflict management efforts and monitoring of resources through collaborative management approach to conflict management model of community-based capture fisheries.

Key Word : Conflict Management Fishing Model, The Harmony Of Society beach

PENDAHULUAN

Pengelolaan Konflik Perikanan Tangkap semakin dibutuhkan saat ini dan perlu mendapat porsi perhatian yang besar. Pengelolaan konflik (*conflict management*) memberikan kontribusi yang signifikan terhadap pengelolaan sumberdaya, termasuk ke dalamnya sumberdaya perikanan tangkap, karena tanpa pengelolaan yang tepat maka konflik dapat menghambat partisipasi masyarakat dan berpengaruh terhadap produktivitas nelayan.

Konflik perikanan tangkap umumnya muncul berkaitan dengan bagaimana mempertahankan kesejahteraan masyarakat, kepentingan industri dan kelestarian sumberdaya perikanan. Charles (1992) telah membuat model konseptual untuk menganalisis berbagai isu konflik perikanan. Kerangka tersebut dikenal sebagai paradigma segitiga (*triangle paradigm*) yang terdiri dari tiga isu yaitu efisiensi/rasional, konservasi dan komunitas sosial.

Dalam pengelolaan sumberdaya alam sering diperdebatkan pentingnya menyatukan persepsi stakeholder dalam proses pengelolaan. Khususnya bagaimana persepsi stakeholder terhadap pengelolaan sumberdaya alam dan bagaimana mereka dapat terlibat dalam proses pengelolaan tersebut.

Model diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengelolaan konflik perikanan tangkap yang didukung dengan partisipasi penuh segenap pemangku kepentingan baik yang terkait secara langsung maupun tidak langsung dalam proses resolusi konflik.

METODE

A. Sumber Data

Pengumpulan data primer (tipologi) dilakukan dengan pendekatan PISCES (*participatory institutional survei and conflict evaluated exercise*) yang dikembangkan Bennett and Jolley (2000). Daftar pertanyaan digunakan sebagai

panduan wawancara yang dilakukan terhadap beberapa orang tertentu (key informan). Pemilihan informan untuk diwawancarai dilakukan secara purposive, yaitu dipilih orang-orang yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti. Antara lain wakil dari instansi pemerintah : (Dinas Perikanan, Lanal, Pol Air, Anggota DPR, Pangkalan Pendaratan Ikan), Aparat pemerintah (Kepala Desa), tokoh masyarakat, masyarakat nelayan: (nelayan lokal yang terdiri dari pemilik, anak buah kapal/ABK, pedagang penampung dan nelayan andon), Organisasi nelayan : Kelompok Masyarakat Nelayan (POKMASWAS), INSAN, AMNES, HNSI, Lembaga Masyarakat : WALHI, serta akademisi.

Data tersebut diperoleh dari sampel sebanyak 200 responden, sesuai dengan anjuran di dalam penggunaan SEM. Sebenarnya ketentuan minimal 100 responden dan maksimal 400 responden (Hair *et al.* 1998).

b Variabel penelitian

Variabel penyebab konflik yaitu : (X1) keberadaan tokoh dalam konflik, (X2) banyak sedikitnya pihak yang terlibat, (X3) keberadaan pihak yang bertolak belakang (X4) isu yang berkembang di masyarkat, (X5) jumlah nelayan, (X6) kompetensi dalam pemanfaatan sumberdaya, (X7) kondisi perekonomian masyarakat, (X8) persepsi masyarakat terhadap stok, X6) adanya keinginan tertentu dalam masyarakat, (X10) keberadaan peraturan dan penegakan hukum, (X11) latar belakang budaya dan adat.

Variabel keefektifan teknik resolusi konflik perikanan tangkap yaitu (X1) litigasi (X2) negosiasi (X3) fasilitasi (X4) avoidance

Variabel yaitu (1) Peningkatan partisipasi (2) Keharmonisan masyarakat nelayan (3) Menjamin keadilan.

c Analisis data dan perancangan model

Perancangan model dilakukan secara deskriptif. Model pengelolaan konflik perikanan tangkap didesain berdasarkan efektifitas dan outcome dari metode resolusi yang didapatkan dari analisis SEM (*Structure Equation Model*), pengalaman-pengalaman dari lokasi lain dalam pengelolaan perikanan tangkap, ditambah dengan mempertimbangkan prekondisi pengelolaan konflik, yaitu terdapatnya hukum/aturan dan kebijakan dan keseimbangan kekuatan diantara pihak yang berkonflik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

**Model Persamaan Struktural
 Kesesuaian model dengan data**

Pendugaan hubungan antara variabel-variabel penyebab konflik (KONFLIK) dengan variabel teknik resolusi konflik (RESOLUSI) dan variabel outcome (OUTCAME) menggunakan teknik Struktur Equation Model (SEM). Setelah model dianalisis melalui analisis faktor konfirmatori, maka masing-masing variabel dalam model fit tersebut dapat digunakan untuk konstruk laten, sehingga full model SEM dapat dianalisis. Hasil pengeolohannya dapat dilihat pada gambar 1 dan tabel 1. Hasil pengujian model menunjukkan bahwa model tersebut signifikan pada α 0.05. Tingkat signifikansi *Chi-Square* model dan nilai indeks seperti GFI dan RMSEA berada pada batas yang ditetapkan :

Tabel 1. Indeks pengujian kelayakan kesesuaian model

Ukuran Goodness Of Fit	Nilai	Yang Disarankan	Evaluasi Model
Statistik Chi-Square (χ^2)	129.37 ; df=123	Kecil	Baik
Nilai-p	0.32928	> 0.05	Baik
Goodness-of-Fit Index (GFI)	0.93	> 0.90	Baik
Root Mean Square Error of Approximation(RMSEA)	0.016	< 0.08	Baik

Ha
 wa mod
 Tingkat
 jukkan a
 Indeks s
 yang dit
 menunju
 dan diny

Hasil Pe
 Da
 kan pad

Tabel 2.

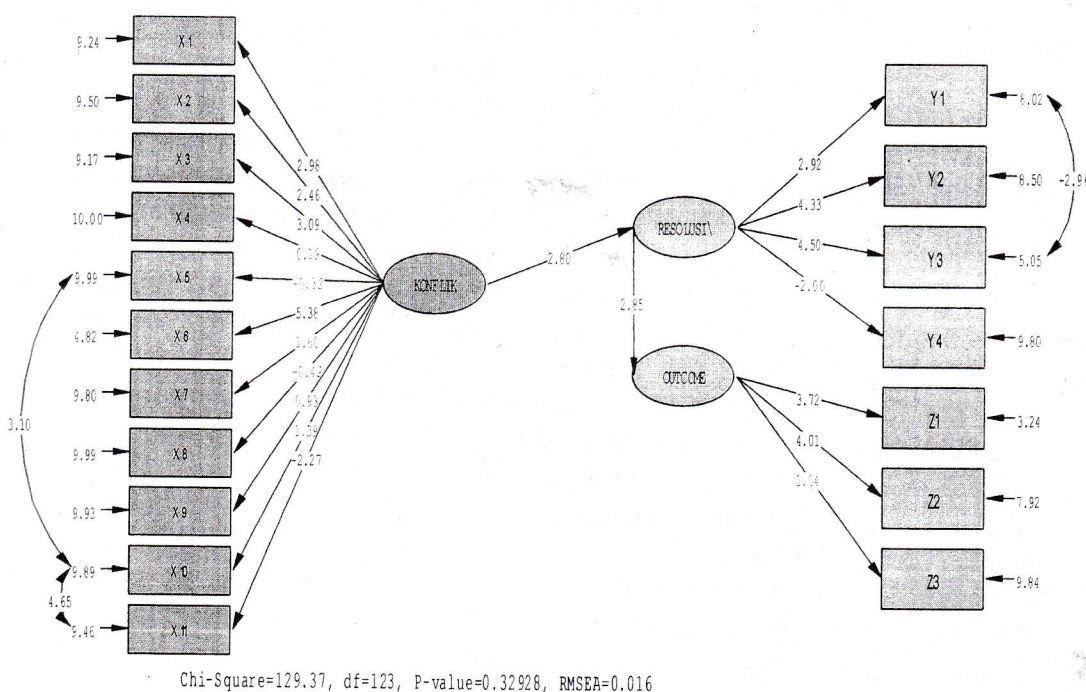
X1
X2
X3
X4
X5
X6
X7
X8
X9
X10

Hasil pengujian model menunjukkan bahwa model tersebut signifikan pada $\alpha = 0,05$. Tingkat signifikansi Chi-Square model menunjukkan angka $129,37 < 1418,57$. Nilai-nilai Indeks seperti GFI, RMSEA berada pada batas yang ditetapkan. Analisa *descriptive statistic* menunjukkan hasil bahwa data layak digunakan dan dinyatakan fit.

Hasil Pengujian Hipotesis

Dari hasil uji terhadap bobot faktor disajikan pada tabel 14 menunjukkan sampai sejauh-

mana kuatnya dimensi-dimensi itu membentuk faktor latennya. Analisis dengan menggunakan uji t terhadap regression weight, apabila C.R (*Critical Ratio*) atau disebut juga dengan t-hitung dalam analisis regresi nilai C.R yang lebih besar dari 2,0 dinyatakan signifikan, maka hasil analisis ini menunjukkan bahwa hipotesis nol yang menyatakan tidak ada perbedaan antara matriks kovarian sampel dengan matriks kovarians populasi yang diestimasi diterima.



Gambar 1. Structural equation model dari Konflik Perikanan Tangkap

Tabel 2. Hasil uji nilai lambda atau faktor loading baku

Model	Koefisien Jalur	t-hitung	Keterangan
X1	0.29	2.98	Significant
X2	0.24	2.46	Significant
X3	0.30	3.09	Significant
X4	0.02	0.19	Tidak significant
X5	-0.03	-0.32	Tidak significant
X6	0.61	5.38	Significant
X7	0.15	1.60	Tidak significant
X8	-0.04	-0.42	Tidak significant
X9	0.09	0.93	Tidak significant
X10	0.14	1.39	Tidak significant

← KONFLIK

X11			-0.23	-2.27	Significant
Y1	←	RESOLUSI	0.35	2.92	Significant
Y2			0.41	4.33	Significant
Y3			0.59	4.50	Significant
Y4			-0.18	-2.00	Significant
Z1		OUTCAME	0.68	3.72	Significant
Z2	←		0.42	4.01	Significant
Z3			0.15	1.54	Tidak significant
KONFLIK	→	RESOLUSI	0.48	2.80	Significant
RESOLUSI	→	OUTCAME	0.59	2.85	Significant

Tabel 3

Hipotes

H1

Pengaruh Faktor penyebab konflik terhadap yang dipengaruhi

Hubungan korelasi antara variabel penyebab konflik (KONFLIK) dengan variabel teknik resolusi konflik (RESOLUSI) pada kasus konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu 2,00 yang mendukung hipotesis 1, yaitu terdapat hubungan yang positif antara kemampuan responden mengidentifikasi faktor penyebab konflik dengan kemampuan memilih teknik resolusi konflik yang digunakan. Tanda positif memberikan indikasi bahwa semakin baik kemampuan mengidentifikasi faktor penyebab konflik maka semakin baik pula kemampuan menentukan teknik resolusi konflik.

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa pada kasus konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan Selatan, variabel penyebab konflik (Konflik) yang merepresentasikan jenis konflik tersebut adalah (X1) keberadaan tokoh dalam konflik, (X2) banyak sedikitnya pihak yang terlibat, (X3) keberadaan pihak yang bertolak belakang (X4) isu yang berkembang di masyarakat, (X5) Jumlah nelayan, (X6) kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya (X7) kondisi perekonomian masyarakat, (X8) persepsi masyarakat terhadap stok, X6) adanya keinginan tertentu dalam masyarakat, (X10) keberadaan peraturan dan penegakan hukum, (X11) latar belakang budaya dan adat

Variabel penyebab konflik yang berpengaruh langsung terhadap variabel teknik resolusi konflik yaitu X1, X2, X3, X6 dan X11 masing masing memiliki nilai loading 0,29; 0,24; 0,30; 0,61 -0,23. Sedangkan observed variable

yang merepresentasikan variabel teknik resolusi konflik (RESOLUSI) yaitu litigasi, negosiasi, fasitasi, avoidane masing-masing nilai loading 0,35; 0,41; 0,59; dan -0,18.

Teknik resolusi konflik yang digunakan di lokasi penelitian telah terbukti efektif, yang ditunjukkan dengan adanya hubungan positif antara teknik resolusi konflik dengan out-came. Teknik resolusi yang utama sesuai dengan penyebab konflik adalah fasilitasi.

B
Tokoh
variabel
banyak
menunj
yang ke
belakang
konflik
pemanf
variabel
yang m
terhada
maka s
belakang
variabel
keempa
belakang
berkem
mening
Indika
berpen
D
faktor
radaan
banyak
radaan
belakang
cara ti
tisipasi
berday
Pertuka
kegiata
P
tahun
rakat a
timbul
tengah
dalam

Tabel 3. Komponen penting dari faktor yang berpengaruh terhadap teknik resolusi konflik yang digunakan

Hipotesis	Faktor yang berpengaruh terhadap Resolusi konflik	Komponen penting yang berpengaruh dan nilai Critical Ratio	Dampak terhadap Faktor penyebab konflik yang dipengaruhi
H1	Faktor Penyebab konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Tokoh (X1= 0,29) • Aktor (X2 = 0,24) • Oposisi (X3 = 0,30) • Kompetisi (X6 = 0.61) • Budaya (X11= -0,23) 	Resolusi - Litigasi - Negosiasi - Fasilitasi - Avoidance

Berdasarkan tabel 3 maka keberadaan Tokoh Dalam Konflik (X1) menunjukkan variabel penyebab konflik utama yang kelima, banyak sedikitnya pihak yang terlibat (X2) menunjukkan variabel penyebab konflik utama yang ketiga, keberadaan pihak yang bertolak belakang (X3) menunjukkan variabel penyebab konflik utama yang kedua, kom-petisi dalam pemanfaatan sumberdaya (X6) menunjukkan variabel penyebab konflik utama yang pertama, yang mana semakin ter-jadi kompetisi dalam terhadap pemanfaatan sumberdaya perairan maka semakin tinggi konflik yang terjadi, latar belakang budaya dan adat (X11) menunjukkan variabel pe-nyebab konflik utama yang keempat, yang mana semakin kecil latar belakang kebe-radaan adat istiadat yang berkembang di masyarakat maka semakin meningkat konflik yang terjadi di masyarakat.

Indikator (Dimensi Aktor) yang berpengaruh

Dimensi aktor (X2 = 0,24) merupakan faktor yang paling berpengaruh yaitu keberadaan tokoh dalam konflik (X1= 0,29), banyak sedikitnya pihak yang terlibat, keberadaan pihak yang bertolak belakang, latar belakang budaya dan adat. Dimensi aktor secara tidak langsung berpengaruh pada partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis resolusi konflik. Pertukaran informasi diharapkan memfa-silitasi kegiatan bersama dari masyarakat.

Peraturan pemerintah (PP) Nomor 69 tahun 1996 mendefinisikan peranserta masyarakat adalah berbagai kegiatan masyarakat yang timbul atas kehendak dan keinginan sen-diri di tengah masyarakat yang berminat dan bergerak dalam penyelenggaraan penataan ruang.

Partisipasi didefinisikan secara umum dalam pengelolaan perikanan adalah suatu proses keterlibatan individu dan masyarakat secara aktif dalam semua tahapan pengelolaan perikanan, dalam arti tujuan untuk mendorong hak menyampaikan pendapat dan menjamin kebijakan yang mencerminkan aspirasi masyarakat. Partisipasi diartikan juga sebagai suatu kesepakatan diantara pihak yang ber-kepentingan yakni pemerintah, masyarakat dan swasta untuk membangun hubungan dan proses yang dibutuhkan dalam merencanakan dan melaksanakan pengelolaan perikanan se-hingga mempunyai basis serta legitimasi yang kuat.

Untuk mencapai suatu tujuan yang menyangkut kepentingan kelompok perlu dukungan dari kelompok lain atau oposisi (X3 = 0,30) yang berkaitan dengan proses pengelolaan konflik. Partisipasi memerlukan beberapa syarat lain dari stakeholder antara lain adalah perwakilan secara demokratis, keterlibatan, kapasitas, kontribusi sesuai kemampuan dan kebutuhan, tanggung jawab, serta komunikasi dan pertukaran informasi.

Latar belakang budaya dalam masyarakat nelayan di daerah penelitian Budaya (X11= -0,23) terbentuk struktur sosial yaitu sipil dan pemerintah. Sipil terbagi 2 (dua) yaitu masyarakat pendatang dan masyarakat asli. Sedangkan masyarakat pendatang ter-bagi 2 (dua) yaitu masyarakat pendatang yang sudah menjadi warga asli dan masyarakat pe-bisnis. Adapun adat istiadat atau norma yang mengatur pola kehidupan masyarakat sehari-hari berlaku secara turun temurun dan meru-pakan ciri yang khas dari suatu komunitas masyarakat.

Indikator(dimensi Sumberdaya) yang berpengaruh

Dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan terjadi kompetisi baik antar nelayan lokal maupun antar nelayan andon dan nelayan luar ($X6 = 0.61$). Kompetisi terjadi dalam penggunaan teknologi alat tangkap dan perebutan lokasi wilayah penangkapan (*fishing ground*). Memperebutkan sumber-daya perikanan bukan persoalan yang mudah. Terdapat kecenderungan yang besar bahwa pengoperasian peralatan tangkap yang lebih canggih, semakin memperderas arus keserakahan perikanan sehingga berdampak serius terhadap kelestarian sumberdaya.

Kompetesi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan berkaitan dengan perilaku nelayan dalam mengalokasikan atau pengoperasian alat tangkapnya. Sebagai mega predator, nelayan mempunyai perilaku yang sangat unik dalam merespon baik perubahan sumberdaya ikan maupun kebijakan yang diterapkan. Pengelolaan sumberdaya ikan yang terpenting adalah bagaimana mengantisipasi perilaku nelayan sehingga sejalan dengan kebijakan yang diterapkan. Sehingga dapat dikatakan juga bahwa pengelolaan perikanan merupakan upaya yang dinamis, yaitu sesuai dengan perspektif para stakeholders yang senantiasa berkembang.

Kompetisi dalam pemanfaatan sumberdaya perikanan sangat berpengaruh pada upaya pengelolaan sumberdaya perikanan berkelanjutan. Perikanan bertanggung jawab mengakomodasi cakupan stakeholder yang luas dengan kesadaran bahwa efisiensi dan pelaksanaan kegiatan ini tergantung pada dukungan stakeholder. Berkaitan dengan hal ini secara umum pemerintah harus mendukung kerjasama dengan stakeholder dalam memfasilitasi penyesuaian dan perubahan dari proses negosiasi antar stakeholder. Menurut (Cincin-Sain dan Knecht 1998) Konflik umumnya terjadi karena beberapa sebab seperti kompetisi area, kompetisi sumberdaya, atau kompetisi terhadap sumberdaya yang saling berkaitan.

Indiator (dimensi lingkungan) yang tidak berpengaruh

Lingkungan ekonomi

Kemiskinan dan masalah kesulitan hidup lainnya merupakan masalah krusial yang selalu dihadapi oleh komunitas nelayan, khu-

susnya nelayan-nelayan kecil atau nelayan-nelayan tradisional.

Sumberdaya manusia nelayan hanya 80% tamat SD, hal ini menyiratkan kemampuan nelayan dalam mengelola sumber-daya pesisir sangat terbatas. Ini disebabkan karena identik dengan berbagai perilaku sosial yang tidak menguntungkan selama ini, budaya konsumtif, menyebabkan nelayan terjebak dalam lingkaran utang dan kemiskinan. Hal ini tentu jauh dari harapan untuk mengelola potensi sumberdaya kelautan yang tidak tak terbatas secara berkelanjutan, maka diperlukan regenerasi nelayan yang memiliki kemandirian, kompetensi dan kapasitas yang memadai pula.

Banyak pihak yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung dengan sumberdaya perikanan. Oleh sebab itu pengaturan kepentingan-kepentingan tersebut harus dilakukan agar tidak saling bertabrakan. Pengaturan kepentingan ini tidak hanya terdapat di dalam atau berlaku untuk masyarakat nelayan atau masyarakat pesisir. Dengan kata lain, penguatan institusi-institusi lokal masyarakat nelayan, tidak akan memiliki dampak berarti bagi upaya mereka mengembangkan keberdayaan

Hukum dan peraturan perikanan

Penegakkan aturan hukum yang melarang penggunaan teknologi penangkapan yang merusak lingkungan, seperti mini trawl yang dapat mengakibatkan kecemburuan sosial dan meningkatkan kesenjangan pendapatan diantara kelompok-kelompok masyarakat nelayan. Penegakkan norma hukum ini tidak mudah dilaksanakan karena potensi untuk melanggarnya cukup besar.

Kebijakan dan pengelolaan sumber-daya perikanan dan kelautan yang ada juga merupakan suatu permasalahan baru dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 32 tahun 2004 tentang otonomi Daerah, dimana pemerintah daerah kabupaten/kota memiliki kewenangan penuh atas pengelolaan sumberdaya yang ada di dalam wilayah laut hingga 4 mil, sedangkan pemerintah daerah provinsi mempunyai kewenangan untuk pengelolaan wilayah laut dan sumberdaya di dalamnya dari 12 mil menjadi hanya 8 mil ke arah laut lepas.

Pengaruh resolusi konflik terhadap yang dipengaruhi (outcome)

Hubungan korelasi antara variabel teknik resolusi konflik (RESOLUSI) dengan variabel pembangunan perikanan (OUT-CAME) yang terdiri dari partisipasi masyarakat dalam pengelolaan perikanan tangkap, pemahaman masyarakat terhadap pengelolaan perikanan tangkap yang berkelanjutan dan

pemahaman masyarakat tentang pengelolaan perikanan tangkap yang berkeadilan.

Tabel 4. Komponen penting dari faktor yang berpengaruh terhadap teknik resolusi konflik yang digunakan

Hipotesis	Faktor yang berpengaruh terhadap Resolusi konflik	Komponen penting yang berpengaruh dan nilai Critical Ratio	Dampak terhadap Faktor penyebab konflik yang dipengaruhi
H2	Resolusi Konflik	<ul style="list-style-type: none"> • Litigasi (y1= 0,35) • Negosiasi (y2 = 0,41) • Fasilitasi (y3 = 0,59) • Avoidance (y4 = - 0,18) 	Outcome

Pada kasus konflik perikanan tangkap di perairan Kalimantan selatan menunjukkan nilai yang signifikan, yaitu 2,05 yang mendukung hipotesis 2 yaitu terdapat hubungan yang positif antara kemampuan responden menentukan teknik resolusi konflik yang digunakan dengan adanya peningkatan Outcome. Tanda positif memberikan indikasi bahwa semakin baik kemampuan responden menentukan teknik resolusi konflik yang digunakan maka terjadi peningkatan partisipasi masyarakat, keharmonisan masyarakat nelayan dan pengelolaan yang berkeadilan yang artinya terjadi efektifitas resolusi yang dilakukan.

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa variabel teknik resolusi konflik (RESOLUSI) berpengaruh langsung terhadap variabel outcome yaitu pemahaman terhadap partisipasi masyarakat, dan keharmonisan masing-masing memiliki nilai loading 0,68 dan 0,42. Tetapi tidak berpengaruh terhadap pengelolaan perikanan tangkap yang berkeadilan.

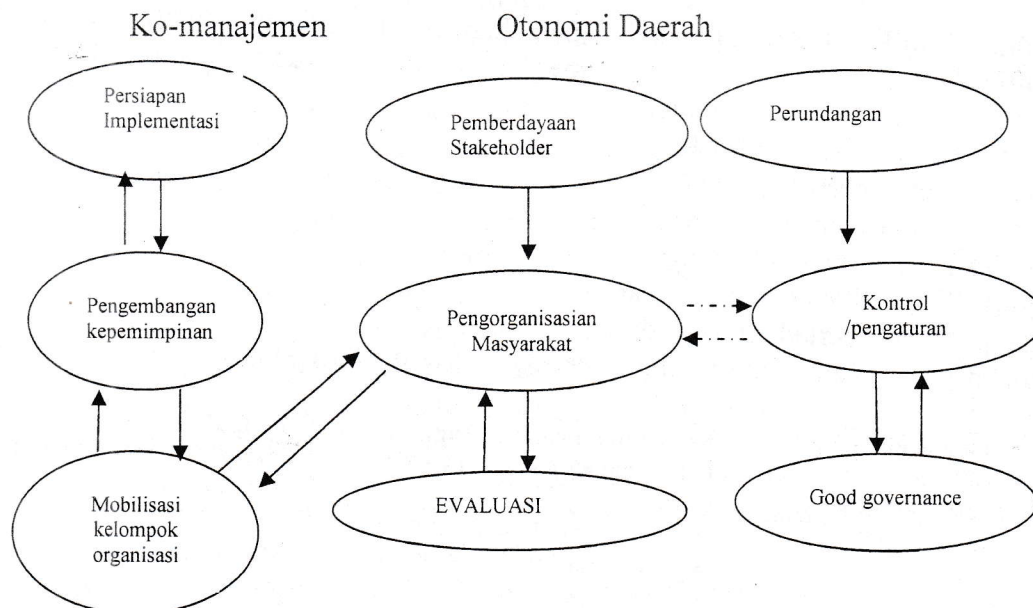
Mekanisme Pengelolaan Konflik

Pengelolaan konflik perikanan di lokasi penelitian dilakukan dengan pendekatan manajemen. Dalam mengawali rezim manajemen telah dilakukan pengorganisasian masyarakat. Pengorganisasian masyarakat merupakan komponen kedua dari model pengelolaan berbasis komunitas. Dengan membentuk suatu kelompok yang berfungsi sebagai

perpanjangan tangan dalam melaksanakan kegiatan dilapangan, kelompok tersebut adalah kelompok masyarakat pengawas (POKMAS-WAS). Hal ini telah memberikan dampak positif. Selain itu melakukan kegiatan pengawasan atau patroli dan melakukan kegiatan sosialisasi UU No. 31 tahun 2004 dan peraturan perikanan serta penyebaran Leaflet. Dengan didirikannya Pokwasmas, resolusi konflik yang terjadi lebih efektif.

Pengawasan pemanfaatan sumberdaya kelautan dan perikanan harus dilakukan secara terus menerus dan ketat oleh semua pihak, baik oleh aparat pemerintah (Pengawas Perikanan. Polisi Perairan dan Udara, TNI Angkatan Laut serta Dinas Perikanan) serta stakeholder dan masyarakat perikanan dalam melakukan penegakan hukum di laut. Namun demikian keterbatasan sarana dan prasarana serta sejumlah personil pengawasan masih menjadi kendala utama dalam pencapaian kinerja pengawasan yang optimal. Di lain pihak potensi dan sumberdaya pengawasan yang ada di masyarakat cukup besar dan menjadi adat budaya sebagai wujud rasa tanggung jawab terhadap lingkungannya.

Mekanisme pengelolaan konflik perikanan tangkap di daerah penelitian disajikan pada gambar 2.



Gambar 2. Mekanisme pengelolaan konflik Interaksi (ditunjukkan tanda panah solid: persepsi responden)

Organisasi masyarakat pantai yang kuat merupakan pendorong bagi keberhasilan pengelolaan sumberdaya perikanan berbasis komunitas. Agar dapat berpartisipasi dalam ko manajemen, unsur-unsur komunitas terkait dalam pengelolaan perlu membentuk organisasi sehingga dapat dicapai suatu kesepakatan tentang keinginan apa yang akan dilakukan kedepan dalam pengelolaan secara bersama ini.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kemampuan stakeholder mengidentifikasi faktor penyebab konflik perikanan tangkap (konflik jalur penangkapan, konflik purse seine, konflik pengambilan teripang dan kerang mutiara, konflik lampara dasar, konflik gill net, konflik bagan apung, konflik seser modern, konflik cantrang) berpengaruh langsung terhadap kemampuan stakeholder memilih teknik resolusi konflik yang digunakan.

Penyebab utama konflik perikanan tangkap berdasarkan loading yaitu keberadaan kompetisi, Oposisi, Tokoh, Aktor dan budaya yang berkembang di masyarakat. Sedangkan teknik resolusi konflik yang utama adalah fasilitasi

Kemampuan stakeholder menggunakan teknik resolusi konflik yang tepat berpengaruh langsung terhadap outcome (pentingnya partisipasi pelestarian perikanan tangkap, keharmonisan masyarakat pesisir)

Mekanisme pengelolaan konflik merupakan upaya yang terintegrasi yang mana pemerintah membutuhkan partisipasi semua pihak dalam upaya pengelolaan konflik dan pengawasan sumberdaya sehingga terbentuk suatu sistem pendekatan

pengelolaan bersama (ko-manajemen) dengan model pengelolaan konflik perikanan tangkap mulai dirancang menggunakan pengelolaan berbasis komunitas.

Saran

Model pengelolaan konflik perikanan tangkap dapat digunakan untuk pedoman implementasi kebijakan dalam perencanaan pengelolaan sumberdaya perikanan, namun akan berbeda pada lokasi lain mengingat situasi dan kondisi aktor, sumberdaya dan lingkungan yang berbeda. Sehingga perlu di-rancang variabel dan diketahui dengan pasti indikator yang berpengaruh.

Karena esensi pengelolaan konflik perikanan tangkap dilakukan dengan mengikutsertakan peran aktif masyarakat setempat (*Community Base Resources Management*), maka disarankan untuk meningkatkan kapasitas nelayan dan HNSI dalam partisipatori.

DAFTAR PUSTAKA

- Bennett E and Jolley T. 2000. *Pisces Field Manual. The Management of Conflict in Tropical Fisheries*. Final Technical Report (CEMARE)
- Cicin-Sain B dan Knecht RW. 1998. *Integrated Coastal and Ocean Management Concepts and Practices*, (Washington, DC: Island Press 1998)
- Charles AT. 1992. *Fishery conflicts: a unified framework*. Journal of Marine Policy.
- Hair JF, Anderson RE, Tatham RL dan Black WC. 1998. *Multivariate Data Analysis*. Fifth Edition. Prentice Hall-International. INC. Prited in the United States of America